

Al-Azhar Islamic Law Review

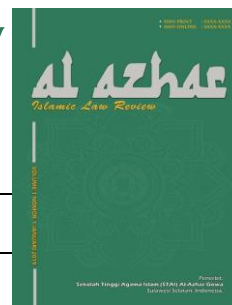
Volume 6 Nomor 1, Januari 2024

ISSN Online: 2656-6133 | ISSN Print: 2654-7120

DOI: <https://doi.org/10.37146/ailrev.v6i1.314>

Penerbit: Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Al-Azhar Islamic Law Review (AILREV) is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Integrasi Kelompok Nasionalis dan Agamis: Sebuah Desain dalam Pemilihan Presiden di Indonesia

Siti Fatimatuzzahroh*, Ramadhan Siddik Pane

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

*E-mail: ftmzahra29@gmail.com

Abstract

The integration of nationalist and religious groups in the context of the presidential election in Indonesia emerged after the 1998 reform. The integration study focused on the interest groups behind the combination. So that studies that examine the implications and images of nationalist and religious integration in this context can be complemented by this research. This study aims to answer the academic question of how the design of the combination of President and Vice President is ideal in post-reform Indonesia. So to answer this question, this research was assembled using qualitative methods with secondary data in the form of analysis of the 2019 Presidential election. The data obtained by the document study method is analyzed by qualitative data analysis methods. This research reveals that the design of nationalist and religious integration within the framework of the presidential election only emerged after the reform in 1998. There have been three times that Indonesia's leadership has been characterized by a combination of nationalist and religious. Presidents Abdurrahman Wahid and Megawati, Megawati and Hamzah Haz, and Joko Widodo and Ma'ruf Amin. This research shows the ideal design for winning today's Presidential election is the integration of nationalists and religious.

Keywords: Religious; Integration; Nationalist; Presidential Election.

Abstrak

Integrasi kelompok nasionalis dan agamis dalam konteks pemilihan Presiden di Indonesia muncul pasca reformasi tahun 1998. Kajian integrasi tersebut terfokus pada kelompok kepentingan yang ada di belakang kombinasi tersebut. Sehingga kajian yang meneliti implikasi dan gambaran integrasi nasionalis dan agamis dalam konteks tersebut dapat dilengkapi dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan akademik bagaimana desain kombinasi Presiden dan Wakil Presiden ideal di Indonesia pasca reformasi?. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini dirangkai menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder berupa analisis terhadap pemilihan Presiden tahun 2019. Data yang diperoleh dengan metode studi dokumen tersebut di analisis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa

desain integrasi nasionalis dan agamis dalam kerangka pemilihan Presiden baru muncul pasca reformasi tahun 1998. Terdapat tiga kali kepemimpinan Indonesia diwarnai dengan kombinasi nasionalis dan agamis. Presiden Abdurrahaman Wahid dan Megawati, Megawati dan Hamzah Haz, serta Joko Widodo dan Ma`ruf Amin. Penelitian ini menunjukkan desain ideal untuk memenangkan pemilihan Presiden dewasa ini adalah integrasi nasionalis dan agamis.

Kata kunci: *Agamis; Integrasi; Nasionalis; Pemilihan Presiden*

1. Pendahuluan

Integrasi kelompok Nasionalis dengan Agamis dalam pergelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia menjadi isu populer dalam era Reformasi. Integrasi ini setidaknya telah digambarkan dengan terpilihnya Wakil Presiden Indonesia ke 9 Hamzah Haz dari Partai Politik PPP dan Wakil Presiden ke 13 Ma`ruf Amin yang merupakan salah satu representasi umat organisasi Nahdlatul Ulama. Terpilihnya dua tokoh bangsa tersebut memunculkan desain baru dalam sistem kekuatan koalisi di Indonesia yaitu adanya integrasi dua aliran ideologi besar di Indonesia. Keadaan demikian diperkirakan akan terjadi juga dalam kontestasi Pilpres 2024.

Penelitian tentang integrasi dua aliran tersebut menjadi menarik karena tokoh agamis diyakini sebagai representasi mayoritas umat Islam di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Hasbi Aswar dkk., bahwa faktor kemenangan Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019 adalah adanya dukungan gerakan pro Jokowi yang secara eksplisit dipimpin oleh barisan Nahdlatul Ulama dan para tokohnya.¹ Kehadiran tokoh-tokoh agama tersebut meningkatkan elektabilitas pemilih terhadap calon tertentu. Perbedaan argumen diungkapkan oleh Addiansyah yang menyatakan bahwa proses koalisi yang dilakukan oleh partai dengan ideologi nasionalis atau agamis sudah tidak memiliki perbedaan. Orientasi kemenangan partai lebih besar daripada sekedar orientasi ideologi partai politik tersebut. Sehingga, pemilih cenderung melihat sosok tokoh daripada gambaran ideologi partai.²

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terkait komprehensif keilmuan dalam Jurnal *Al-Azhar Islamic Law Review* terdapat keasingan dan ruang

¹ Hasbi Aswar dkk., "Pertarungan Narasi Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019," *Politea* 5, no. 2 (2022), hlm. 241.

² M. Nur Rofiq Addiansyah, "Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis Dan Pragmatis," *Politea* 2, no. 2 (2019), hlm. 189.

kosong terkait isu-isu Hukum Ketatanegaraan Islam. Penelitian ini dilakukan sebagai pelengkap dan mengisi kekosongan ruang tersebut dalam rangka kompleksitas keilmuan dalam jurnal tersebut. Sehingga posisi penelitian ini sangat penting dalam peta besar keilmuan Hukum Tata Negara Islam di Indonesia.

Referensi Penelitian awal dilakukan oleh Mukari dkk., yang menunjukkan bahwa Kiai di Jawa Timur mampu memenangkan Pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin dengan keunggulan yang signifikan. Keberhasilan tersebut menjadi kemenangan atas perlawanan politik identitas antara nasionalis dan Islam.³ Arifin (2022) mengkaji tokoh-tokoh dari kelompok agamis yang memiliki andil dalam kontestasi Pilpres di Indonesia. Tokoh yang dimunculkan dalam Pilpres 2019 adalah Ma`ruf Amin. Penelitian ini mengungkapkan munculnya Ma`ruf Amin dalam skema Pilpres dapat menjembatani kepentingan kelompok agamis. Selain nama tersebut muncul juga nama Din Samsudin, Hidayat Nurwahid, TGB Zainul Majdi.⁴

Penelitian Zainuddin dkk., mengungkapkan bahwa isu-isu keagamaan dalam kontestasi Pilpres 2019 berujung terhadap politisasi agama. Munculnya Isu tersebut atas kepentingan sesaat sebagai pemaparan pragmatisme politik. Kepentingan ideologi dalam hal ini nasionalis dan agamis tetap terlihat dengan jelas meskipun tidak muncul ke permukaan.⁵ Selanjutnya Peter (2021) memberikan gambaran tantangan Indonesia dalam mewujudkan kontestasi demokrasi yang adil dan sejahtera adalah menyatukan bangsa atas segala paham aliran dan kepentingan. Perspektif sejarah menunjukkan menunjukkan urgensi pendekatan yang lebih efektif dalam menghadapi tuntutan masing-masing kepentingan. Contohnya adalah menjelang berakhirnya Pemerintahan Orde Baru di mana Soeharto sering menjumpai tokoh-tokoh agamis.⁶

Penelitian Mansur menggunakan terminologi lain dari beberapa penelitian sebelumnya, bahwa terjadinya polarisasi politik antara kelompok islamis dan

³ Mukari Mukari, dkk., "Kiai Sebagai Kekuatan Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Jawa Timur," *Politea* 5, no. 1 (2022), hlm. 15.

⁴ Indar Arifin, "Agama Dalam Pelaksanaan Dan Kemenangan Pemilu Pilpres, Sebagai Sebuah Realitas Politik Di Indonesia," *JPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 4 (2022), hlm. 1049.

⁵ Zainudin dkk., "Of Religion in the 2019 Indonesian Presidential Election" *AHKAM* 22, no. 1 (2019), hlm. 357-384.

⁶ Peter Suwarno, "Conservative Islamic Factions vs. Secular Nationalists: Toward a Civil Contestation in Democratic Indonesia," *Indonesian Journal of Social Sciences* 13, no. 2 (2021), hlm. 62.

pluralis di Indonesia tahun 2014-2019 merupakan ulah dari aktor politik itu sendiri.⁷ Salah satu representasi kelompok agamis, Kyai NU menunjukkan peran yang sangat vital dalam proses pemenangan Jokowi dan Ma`ruf Amin pada tahun 2019. Hal ini merupakan gambaran dari pengaruh tokoh agamis yang signifikan dalam kontestasi tersebut. Sehingga kolaborasi antara Nasionalis (Jokowi) dan Agamis (Ma`ruf Amin) mendapatkan dukungan dari Kyai NU di Jember.⁸

Penelitian terdahulu terhadap hubungan dan persaingan antara kelompok nasionalis dan agamis menunjukkan persentase keberhasilan demokrasi Indonesia dapat ditentukan dengan kedua aliran tersebut. Berkaca pada Pilpres 2019 berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa urgensi integrasi nasionalis dan agamis untuk memenangkan suatu kontestasi demokrasi adalah cara yang efektif. Akan tetapi terdapat ruang yang kosong apakah integrasi antara kedua aliran tersebut akan mewujudkan hasil yang lebih demokratis. Beberapa literatur sebelumnya sepanjang penelusuran peneliti hanya sebatas kajian integrasi antara nasionalis dan agamis secara mikro. Akan tetapi penelitian ini secara makro melihat integrasi tersebut dalam skala yang lebih luas melalui desain baru koalisi kelompok nasionalis dan agamis serta implikasinya terhadap desain ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan akademik bagaimana desain kombinasi Presiden dan Wakil Presiden ideal di Indonesia pasca reformasi?. Penelitian ini secara umum dilakukan untuk menambah preferensi baru tentang konsep ideal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pasca reformasi tahun 1998.

2. Metode Penelitian

Peneliti memanfaatkan metode kuantitatif dalam menyelesaikan fenomena dalam rangkaian penelitian ini. Studi atas pengalaman Pemilihan presiden 2019 adalah sebagai tolak ukur dalam pengambilan data penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi dokumen atas berbagai data yang dikumpulkan dari *website* serta beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian, data yang

⁷ Ibnu Chaerul Mansyur, "Polarisasi Politik Di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka," *Jurnal Politik Profetik* 11, no. 1 (2023), hlm. 1-22.

⁸ Abdul Haris dan Abdulloh Dardum, "Kiai Nu Dan Politik (Keterlibatan Kiai Nu Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)," *Fenomena* 20, no. 1 (2021), hlm. 91-114.

diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis dengan tiga pertimbangan awal, yaitu proses reduksi data, penyajian data serta verifikasi atas data tersebut.

3. Hasil dan Analisis

Awal dari hasil penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel berupa data yang menunjukkan gabungan presiden dan Wakil Presiden adalah kolaborasi yang ideal untuk memenangkan pesta demokrasi di Indonesia di era modren.

No	Presiden	Wakil Presiden	Periode Jabatan
1	Soekarno	Mohammad Hatta	1945-1956
2	Soeharto	Sri Sultan Hamengkubuwana IX	1973-1978
		Adam Malik	1978-1983
		Umar Wirahadikusumah	1983-1988
		Sudharmono, S.H.	1988-1993
		Try Sutrisno	1993-1998
	Habibie	1998	
3	B.J. Habibie	Kosong	1999
4	Abdurrahman Wahid	Megawati Soekarno Putri	1999-2001
5	Megawati Soekarno Putri	Hamzah Haz	2001-2004
6	Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla	2004-2009
		Boediono	2009-2014
7	Joko Widodo	Jusuf Kalla	2014-2019
		Ma`ruf Amin	2019-2024

Berdasarkan data dalam uraian tabel di atas, periodisasi kepemimpinan Presiden di Indonesia di bagi dalam tiga fase. Fase pertama adalah fase Pemerintahan Pasca Kemerdekaan dengan kepemimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta pada tahun 1945-1956. Akan tetepi fase orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno berlangsung sampai berakhirnya demokrasi terpimpin. Fase kedua adalah fase Pemertintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Fase ini berlangsung dari tahun 1973 sampai tahun 1998. Pada fase tersebut terdapat 6 Wakil Presiden yang mendampingi Soeharto. Kemudian fase terakhir adalah pasca Reformasi. Pada fase tersebut samapi tahun 2023 telah terjadi 5 pergantian Presiden Indonesia. Fase Reformasi pertama dipimpin oleh B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Kombinasi antara Soekarno dan Muhammad Hatta adalah kombinasi dari golongan nasionalis dan Presiden Soeharto dan 6 wakilnya adalah gabungan dari kelompok nasionalis. Kemudian Pasca Revormasi kombinasi Presiden dan Wakil Presiden di

Indonesia mulai memunculkan warna ketika Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri terpilih. Sehingga perpaduan keduanya merupakan kombinasi Presiden dari tokoh yang mewakili tokoh agamis dan Wakil Presiden mewakili tokoh nasionalis. Kombinasi warna itu terulang pada Pemerintahan Megawati dengan memilih Hamzah Haz sebagai wakilnya. Megawati merupakan perwakilan dari kelompok nasionalis dan Hamzah Haz dari Partai PPP adalah representasi kelompok agamis. Kemudian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kombinasi tersebut hilang dan kembali pada konsep dua nasionalis. Sehingga warna kombinasi nasionalis agamis kembali muncul pasca terpilihnya Presiden Joko Widodo dan Ma`ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk Periode 2019-2024.

Berdasarkan data tersebut kombinasi nasionalis agamis pada kepemimpinan Indonesia hanya terjadi pasca Reformasi. Terdapat tiga kesempatan kombinasi tersebut memimpin Indonesia. Pada tahun 1998, terjadi pergeseran besar dalam pandangan politik Indonesia ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah adanya tekanan dari masyarakat, dan era reformasi politik dimulai. Pemilihan presiden secara langsung kemudian menjadi salah satu elemen kunci dari reformasi ini. Dalam beberapa pemilihan presiden berikutnya, peran tokoh yang memiliki pandangan nasionalis dan keagamaan menjadi faktor krusial dalam memperoleh dukungan dari pemilih.

Periode pasca reformasi, kebijakan-kebijakan yang memengaruhi berbagai bidang kehidupan di Indonesia telah dirumuskan oleh presiden dan wakil presiden yang berasal dari gabungan individu dengan pandangan nasionalis dan keagamaan. Keputusan-keputusan tersebut turut berdampak pada dinamika ekonomi, politik, dan sosial, serta hubungan antar-agama. Kebijakan inklusif yang diusung oleh Gus Dur terkait dengan keberagaman dan toleransi menciptakan suatu lingkungan yang mendukung upaya pembangunan nasional.⁹ Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, dampaknya terhadap arah politik Indonesia masih dapat dirasakan melalui semangat toleransi dan inklusivitas yang diwariskan. Saat Megawati menjadi pemimpin, perhatiannya terhadap persatuan nasional dan peningkatan stabilitas politik menggambarkan bagaimana seorang pemimpin nasionalis dapat berperan sentral dalam memperkokoh fondasi negara. Meskipun agama tidak

⁹ Khoirotun Ni`mah dkk., "Gus Dur's Multicultural Traces: Welcoming Social Harmony Through The Rights Of Religious Minorities," *SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2023), hlm. 152–166.

menjadi fokus utama kebijakannya, keputusan-keputusan tersebut tetap mencerminkan nilai-nilai moral yang seringkali terdapat dalam ajaran agama.¹⁰

Seiring berlalunya waktu, terus muncul tantangan dan peluang dalam menjaga keseimbangan antara dimensi nasionalis dan agamis. Pemilihan presiden berikutnya diprediksi akan dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik, yang kemungkinan akan memengaruhi cara presiden dan wakil presiden memahami serta menanggapi aspirasi masyarakat. Kesulitan seperti polarisasi politik, ketegangan antar-agama, dan isu-isu keamanan nasional mungkin menyulitkan kerangka kombinasi nasionalis dan agamis.¹¹ Meskipun demikian, di tengah tantangan tersebut, terdapat juga peluang untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keragaman di Indonesia.

Kelompok yang memiliki pandangan nasionalis seringkali terkait dengan prinsip-prinsip Pancasila dan semangat untuk memperkuat persatuan nasional. Ketika terlibat dalam pemilihan presiden, para tokoh dengan pandangan nasionalis sering menyoroti signifikansi kedaulatan negara dan integritas wilayah. Pemilih yang menganut paham nasionalis biasanya lebih cenderung memilih kandidat yang dianggap telah secara aktif memperjuangkan kepentingan nasional.¹² Kelompok yang bersifat agamis, terutama kelompok Muslim, memiliki dampak yang mencolok dalam proses pemilihan presiden. Dalam situasi ini, pemilih cenderung memilih kandidat yang dianggap memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kebijakan-kebijakan yang mendukung aspirasi dan kebutuhan kelompok agamis, seperti pendidikan agama dan moralitas, sering kali menjadi fokus utama perhatian.¹³

Gabungan antara unsur nasionalis dan agamis dalam proses pemilihan presiden memberikan dampak penting terhadap arah kebijakan dan dinamika politik di Indonesia. Pemimpin yang mampu mencapai keseimbangan antara kedua dimensi ini biasanya lebih mampu membangun kesepakatan nasional dan mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Kombinasi ini juga menimbulkan

¹⁰ Diah Permata Megawati dan Setiawati Soekarnoputri, “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 11, no. 1 (2021)49–66.

¹¹ Mansyur, “Polarisasi Politik Di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka.”

¹² Yessy Tri Iswara and Arwanto Harimas Ginting, “Meningkatkan Semangat Nasionalisme Melalui Pendidikan Pancasila Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment* 2, no. 1 (2022), hlm. 11–23.

¹³ Romel Masykuri and Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan, “Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan Dan Polarisasi Di Antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021), hlm. 68–87.

tantangan dan tanggung jawab yang besar. Pemimpin perlu mampu mengelola perbedaan pandangan dan kepentingan di antara kelompok nasionalis dan agamis, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kepentingan bersama. Pencapaian keseimbangan ini menjadi faktor kunci dalam upaya menciptakan stabilitas politik dan sosial. Proses pemilihan presiden mencerminkan dinamika politik serta perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia. Dalam beberapa pemilihan terakhir, terjadi perubahan dalam kecenderungan pemilih, di mana isu-isu sosial dan ekonomi memainkan peran yang signifikan selain aspek nasionalis dan agamis. Pemilih semakin memiliki kemampuan untuk secara bijak menilai kapabilitas calon presiden dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh bangsa.¹⁴

Dalam menghadapi masa depan, tugas yang paling krusial adalah menjaga harmoni antara kelompok nasionalis dan agamis dalam menghadapi perubahan global dan dinamika internal. Dalam konteks ketatanegaraan problem yang kompleks membutuhkan solusi yang revolusioner.¹⁵ Perspektif lain, ada peluang besar untuk memperkuat dialog antara kedua kelompok ini, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan demokrasi dan pembangunan nasional. Dalam situasi pemilihan presiden di Indonesia pasca reformasi, pengaruh gabungan kelompok nasionalis dan agamis memberikan dampak yang cukup besar terhadap dinamika politik dan proses pembuatan kebijakan.¹⁶ Kombinasi ini mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman yang menjadi karakteristik khas Indonesia. Menjaga keseimbangan antara kelompok nasionalis dan agamis menjadi kunci untuk menciptakan pemimpin yang dapat menerima seluruh lapisan masyarakat dan menggerakkan kemajuan bangsa. Melibatkan berbagai kelompok secara inklusif memungkinkan Indonesia untuk terus memperkuat dasar demokrasinya dan membimbing negara ke arah masa depan yang lebih baik khususnya dalam hal kebijakan memerangi teorisme dan radikalisme.¹⁷

¹⁴ Frenki M.Si, "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021), hlm. 29-48.

¹⁵ Ramadhan Siddik Pane dan Sawaluddin Siregar, "Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah," *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2002), hlm. 153-206.

¹⁶ Taufik Hidayatulloh and Theguh Saumantri, "The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia," *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 3, no. 1 (2023), hlm. 1-25.

¹⁷ D A Putra and A Rulloh, "Model Kepemimpinan Strategis Dalam Menghadapi Radikalisme Dan Terorisme," *MARAS: Jurnal Penelitian ...*, no. 2022 (2023), hlm. 508-519.

3.1 Integrasi Partai: Koalisi Partai Politik antara Ideologi Nasionalis dan Islam

Kebutuhan koalisi antar beberapa partai dalam proses pencalonan Presiden berdasarkan regulasi Pemilihan Umum adalah hal yang mutlak. Alasan mendasar atas kebutuhan koalisi antar beberapa partai tersebut adalah keharusan mutlak yang diberikan hukum bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden setidaknya harus memiliki 20% suara partai politik di parlemen atau 25% suara partai yang sah secara nasional pada pemilihan DPR sebelumnya (Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).¹⁸ Sehingga untuk pengajuan dan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan 2024 harus berdasarkan gabungan suara partai atau koalisi, sekalipun terdapat partai yang melampaui ambang batas tersebut.¹⁹ Berdasarkan tuntutan regulasi tersebut mekanisme pencalonan efektif dilakukan dengan metode koalisi antar berbagai partai guna memenuhi ambang batas suara pencalonan.

Berkaca pada Pemilihan Presiden 2019, terdapat dua poros koalisi besar yang menjadi sumber kekuatan. Koalisi pertama adalah gabungan dari Partai PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, dan PPP. Sedangkan untuk poros kedua merupakan gabungan dari Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat.²⁰ Dalam kacamata umum patron koalisi pertama merupakan gabungan dari Partai politik nasionalis dan Islam dan hal yang sama pada koalisi kedua sebagai gabungan nasionalis dan Islam. Salahuddin dkk, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa potensi akar rumput Islam adalah gambaran peta politik Islam yang sangat berpengaruh terhadap dominasi perolehan suara. Dalam konteks Indonesia patron Islam hanya bisa bersatu pada kekuatan politik apabila dapat diakomodasikan dengan efektif.²¹

Prahara munculnya konflik internal partai Islam seperti PPP dan PKS tidak secara eksplisit mempengaruhi kontribusi partai tersebut dalam mengumpulkan suara. Tahun 2014 letusan konflik PPP berujung terhadap perubahan struktur fraksi di DPR serta awal tahun 2019 konflik yang terjadi di internal PKS setelah partai

¹⁸ Al Mas'udah, "The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia," *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020), hlm. 37-58.

¹⁹ Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021), hlm. 15-37.

²⁰ Addiansyah, "Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis Dan Pragmatis." *POLITEA: Jurnal pemikiran Politik Islam* 2, No. 2 (2019), hlm. 189-198.

²¹ Salahudin dkk., "Islamic Political Polarisation on Social Media During the 2019 Presidential Election in Indonesia," *Asian Affairs* 51, no. 3 (2020), hlm. 656-671.

tersebut menyodorkan sembilan nama sebagai capres atau cawapres.²² Ari Ganjar mengungkap lahirnya partai Islam baru pasca Pilpres 2019 adalah berorientasi terhadap konflik internal yang terjadi dalam beberapa partai Islam. Kemudian alasan berikutnya adalah gejolak politik hasil pemilu Presiden 2019 yang memicu polarisasi sehingga munculnya Partai Ummat dan Partai Masyumi-Reborn.²³

Pengaruh konflik tersebut tidak secara langsung mempengaruhi efektivitas koalisi dengan partai Islam. Alasannya adalah koalisi pertama sebagaimana dijelaskan di atas mampu meraup suara unggul atas koalisi kedua sekalipun masing-masing koalisi memiliki partai Islam. Sehingga faktor pendorongnya adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang cenderung ke koalisi pertama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammadiyah secara jelas memilih jalan moderat dengan tidak mendukung salah satu calon, akan tetapi polarisasi anggota Muhammadiyah terlihat dalam pemilihan pemimpin tersebut.²⁴ Sedangkan Nahdlatul Ulama secara pragmatis memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih pasangan calon tertentu, akan tetapi secara struktur organisasi NU lebih condong terhadap Joko Widodo.²⁵

Posisi santri dalam gambaran Pilpres 2019 mengalami polarisasi, hal ini disebabkan polarisasi politik Islam itu sendiri. Selain itu penyebab terjadinya polarisasi adalah adanya narasi-narasi dari kedua kubu pasangan dalam memining suara santri.²⁶ Masing-masing calon memberikan gaya pesona tersendiri untuk masing-masing santri sebagai basis pendukung. Sampai pada akhir kesimpulan bahwa masing-masing calon bergerak aktif untuk menarik sipati kelompok santri yang berujung terhadap adanya polarisasi tersendiri di kalangan santri itu sendiri.

Polarisasi santri sesungguhnya menjadi kekuatan tersendiri kalangan mayoritas Islam dalam menentukan sikap politik. Hal ini karena selain mewakili kalangan terpelajar muda, santri juga merepresentasikan kalangan Islam secara komprehensif. Sebagai contoh adalah santri-santri yang belajar di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama atau di lingkungan Muhammadiyah masing-masing

²² Amin Nurdin dkk., , *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP Dan PKS* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 7.

²³ Ari Ganjar Herdiansah, "Intra-Party Conflict and the Emergence of Islamic-Based Parties in the Post-2019 Election in Indonesia," *Journal of Governance* 6, no. 2 (2021).

²⁴ Haedar Nashir dkk., "Muhammadiyah's Moderation Stance in the 2019 General Election," *Al-Jami'ah* 57, no. 1 (2019), hlm. 1-24.

²⁵ Aji Sakti Hidayatullah dkk., "Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8, no. 2 (2022), hlm. 197-206.

²⁶ Mohamad Khoirul Fata dan Pusham Surabaya, "Membaca Polarisasi Santri Dalam Kontestasi Pilpres 2019," *Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 18, no. 2 (2018), hlm. 325-346.

adalah representasi dari masing-masing organisasi tersebut. Konteks yang sama jika dilihat berdasarkan kaca mata loyalitas, kesetiaan santri akan hak politik adalah hal yang besar dan potensial. Santri menunjukkan kontribusi yang besar dalam peta politik Indonesia dan memiliki kekuatan politik yang besar yang mampu mengubah sistem perpolitikan di Indonesia.

3.2 Integrasi Tokoh: Gabungan Calon Nasionalis dan Tokoh Islam

Peta baru dalam kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia adalah pasangan yang terintegrasi antara representasi ideologi nasionalis dan agamis. Kebutuhan integrasi tersebut adalah solusi atas problematik negara yang tidak hanya berpusat pada skala ideologi nasionalis akan tetapi perlu mendapatkan dukungan dari ideologi keagamaan. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, dinamika kedua ideologi tersebut mewarnai kepemimpinan di Indonesia. Soekarno dengan konsep Nasakom mengakomodir berbagai ideologi yang berkembang di Indonesia pada era orde lama. Konsep Nasakom sejatinya merupakan hasil pemikiran Soekarno muda tentang Islamisme, Marxisme, dan Nasionalisme. Konsep politik baru oleh Soekarno untuk menambah kekuatan politik orde lama.²⁷ Integrasi antara Ideologi Nasionalis, agama, dan Komunis era orde lama hanya sebatas pada peta pemikiran. Akan tetapi dalam praktiknya pengaruh integrasi tersebut tertutupi dengan gaya otoritarianisme ala Soekarno.²⁸

Potret politik Natsir mengemukakan integrasi moderat. Natsir menerima konsep demokrasi yang digagas oleh Barat akan tetapi demokrasi tersebut tidak bebas nilai. Agama dengan leluasa dapat bergerak dalam satu konsep demokrasi tanpa harus mendapatkan intervensi dari berbagai pihak. Natsir sendiri dengan konsep politik integrasi moderat membawa sistem politik Indonesia ke arah yang lebih modern. Artinya agama bukan menjadi batu ganjal atas berkembangnya demokrasi dan sistem pemerintahan yang baik. Sebaliknya, dengan partisipasi aktif agama tidak dapat dipisahkan terhadap roda perjalanan negara. Natsir dengan jelas menolak sekularisasi dan memunculkan integrasi moderat.

Berkaca pada sejarah, peta integrasi antara ideologi nasionalis dan agamis telah terjadi pada tingkatan konsep. Reformasi Indonesia pasca era orde baru integrasi yang awalnya hanya pada tataran konsep berkembang menjadi ke arah praktik. Peta kepemimpinan mulai menggambarkan adanya gabungan dua tokoh yang berbeda

²⁷ Ahmad Burhan Hakim dan Muhyidin, "Soekarno Dan Nasakom Dalam Pendekatan Idiosinkratik (Psikologi Kepemimpinan)," *Conseils: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2023), hlm. 13-19.

²⁸ Yayang Nuraini Zulfani, "Palangka Law Review," *Palangka Law Review* 02, no. 02 (2022), hlm. 27-45.

ideologi. Integrasi kepemimpinan Megawati sebagai tokoh Nasionalis bersama dengan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden merupakan tokoh agamis yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan. Contoh ini merupakan perkembangan nyata dalam praktik revolusi integrasi dalam konsep menuju integrasi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Posisi Hamzah Haz sebagai wakil Presiden Indonesia sekaligus representasi suara-suara agama Islam.

Pemilihan Presiden 2019 yang dimenangkan oleh Pasangan Joko Widodo dan Ma`ruf Amin. Joko Widodo merupakan representasi pemimpin yang mewakili golongan ideologi nasionalis dan Ma`ruf Amin pemimpin yang mewakili ideologi agama Islam. Integrasi kedua tokoh tersebut selain mewarnai peta perpolitikan Indonesia dalam perspektif pluralisme akan tetapi dalam juga memunculkan konsep baru dalam strategi kemenangan dan mengumpulkan suara rakyat. Joko Widodo figur pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi kemudian disempurnakan dengan wakil yang memiliki karakter keagamaan yang kuat menjadikan perpaduan yang hebat. Sehingga gabungan calon tersebut berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2019.

Perspektif kepentingan bangsa, integrasi antara ideologi merupakan suatu kebutuhan dewasa ini. Nasionalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila semakin berkurang di era dewasa ini.²⁹ Permasalahan akan kesetiaan dan menjaga eksistensi keutuhan negara dengan memperkuat tenaga amunisi Tentara Nasional dan pendidikan nilai-nilai Nasionalisme. Berikutnya adalah gambaran Indonesia dewasa ini tentang budaya korupsi dan penegakan hukum semakin memprihatinkan.³⁰ Tantangan nasionalisme berikutnya adalah keadilan sosial. Negara seharusnya bukan hanya mementingkan keadilan hukum dan pangan untuk rakyat akan tetapi juga membutuhkan keadilan sosial. Peta problematik di atas akan efektif diselesaikan berdasarkan tipe kepemimpinan yang memiliki jiwa dan pemikiran yang nasionalis tinggi. Jiwa nasionalis seorang pemimpin akan membawa problematik negara ke arah yang lebih meyakinkan.

Perspektif problematik keagamaan, dewasa ini Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang berjiwa spiritual keagamaan yang baik. Berbagai problematik negara yang dimulai dengan polarisasi antar umat beraga di Indonesia dan

²⁹ Elisa Puspita Ratri and Fatma Ulfatun Najicha, "Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022), hlm. 25-33.

³⁰ Nanci Yosepin Simbolon, "Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019," *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020), hlm. 157-177.

kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Isu keagamaan yang aktif di Indonesia berkaitan dengan gerakan-gerakan keagamaan yang berada dalam nilai kewajaran, kasus diskriminatif pendirian rumah ibadah, kekerasan terhadap kelompok minoritas, dan penafsiran keagamaan tertentu yang berpotensi memiliki penafsiran yang berbeda dengan yang lain. Isu-isu keagamaan tersebut di atas berpotensi menghancurkan bangsa apabila tidak di minimalkan dari akar-akarnya. Sehingga selain karakter nasionalis, Indonesia juga membutuhkan sosok pemimpin yang menguasai dan memiliki kepribadian yang agamis untuk menjawab problematik tersebut di atas.

Berdasarkan tantangan dan problematik tersebut di atas, Indonesia membutuhkan integrasi kepemimpinan yang berasal dari golongan pemimpin yang memiliki jiwa dan pemikiran yang nasionalis dan pemimpin yang berjiwa agamis. Kebutuhan tersebut bukan hanya pada tataran konsep akan tetapi mengarah kepada praktik ketatanegaraan (terutama dalam bidang ketatanegaraan Indonesia). Ideal gabungan kepemimpinan dewasa ini efektif untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia.

3.3 Kajian Peluang Integrasi Pemimpin antara Nasionalis dan Agamis dalam Konteks Stabilitas Nasional

Kombinasi nasionalis dan agamis secara positif dapat menciptakan iklim pemilihan yang lebih dinamis dan stabil. Akan tetapi demokrasi memberikan hak yang sama pada setiap warga negara untuk menentukan calon terbaik menurut standard pribadi masing-masing. Penelitian ini akan memaparkan beberapa poin peluang positif yang akan terjadi apabila Presiden dan wakilnya merupakan kombinasi dari kelompok nasionalis dan agamis. Aspek peluang tersebut meliputi identitas bersama, peluang legitimasi politik, stabilitas politik, meminimalisir konflik identitas, dan menghindari polarisasi masyarakat.

Pertama, Paduan antara semangat nasionalisme dan prinsip-prinsip agama berpotensi mampu memperkuat kesatuan identitas dalam masyarakat. Hal ini dapat memobilisasi dukungan secara meluas dengan membentuk fondasi persamaan nilai dan sasaran nasional. Menciptakan pemerintahan yang mencerminkan keragaman etnis, agama, dan budaya dalam masyarakat merupakan cita-cita demokrasi. Sehingga pemimpin yang merupakan integritas atas dua kepentingan besar dapat bersatu akan mempermudah mewujudkan cita-cita demokrasi berdasarkan kekuatan semangat identitas bersama. Perbedaan dijadikan sebagai kekuatan dalam mewujudkan rekonsiliasi kepentingan. Sehingga apabila hal ini terjadi, maka konteks perbedaan di Indonesia akan mengalami kemunduran persepsi negatif.

Kedua, Pemimpin yang memadukan unsur nasionalisme dan agama mungkin memperoleh dukungan politik yang lebih luas, karena kedua komponen ini dapat dipergunakan untuk mengukuhkan kedudukan dan meraih dukungan mayoritas. Keselarasan nilai dan identitas antara kekuatan nasionalis dan agamis berpotensi besar memperkuat legitimasi keabsahan politik. Pemilih cenderung mendukung calon pemimpin yang mampu menyatukan nilai-nilai kepentingan nasionalis dan agamis tanpa harus mengesampingkan kepentingan kelompok lain yang ada di wilayah tersebut. Sehingga pada akhirnya dalam rangka mencapai legitimasi politik yang optimal calon pemimpin harus mempertimbangkan aspek nasionalis dan agamis pada setiap kebijakan yang akan ditempuhnya. Kesesuaian antara semangat nasionalisme dan prinsip-prinsip keagamaan, bersama dengan penanggulangan isu-isu sosial dan ekonomi yang efisien, mungkin menjadi faktor penentu keberhasilan dalam meraih dukungan dan pengakuan dari masyarakat.

Ketiga, Stabilitas politik memegang peranan krusial dalam kelangsungan pemerintahan serta pembangunan jangka panjang. Ketika memilih kandidat presiden dan wakil presiden yang berasal dari aliansi kelompok nasionalis dan agamis, ada sejumlah faktor yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kemungkinan stabilitas politik yang mereka miliki. Pertahanan keseimbangan kekuasaan antara kelompok nasionalis dan agamis merupakan kunci utama. Penelitian Dahl mengindikasikan bahwa stabilitas politik dapat dicapai ketika kelompok-kelompok berbeda memiliki representasi yang adil dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, menjaga proporsi yang seimbang dalam proses pengambilan keputusan dapat mencegah timbulnya konflik internal.³¹ Pemimpin yang hasil integrasi kedua kepentingan tersebut juga mampu menciptakan inklusivitas kebijakan. Kebijakan pemerintah harus mengedepankan prinsip inklusivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Norris (2008) mencerminkan bahwa kebijakan yang berfokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi mampu membentuk stabilitas politik jangka panjang dengan mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.³²

Keempat, Kerja sama antara kelompok yang mementingkan nasionalisme dan aspek keagamaan dapat menciptakan suatu tatanan representasi yang lebih adil, mengakui beragamnya nilai dan cita-cita dari setiap kelompok. Ini dapat mengurangi ketidakpuasan dan memberikan rasa keterlibatan kepada semua warga masyarakat, menghasilkan kepuasan yang lebih luas di antara anggota populasi.

³¹ Robert Dahl, "The Concept of Power," *Paradigms of Political Power* 2, no. 3 (1957), hlm. 78-104.

³² Pippa Norris, *Do Power-Sharing Institutions Work ?*, Cambridge University Press, 2008.

Dengan bersinergi, masalah-masalah sensitif seperti agama dapat dikelola dengan cara yang lebih cerdas dan terampil. Pemimpin yang mampu mengatasi masalah yang bersifat sensitif dengan kecerdasan dapat membentuk lingkungan yang mendukung bagi penyelesaian konflik secara damai. Dengan melibatkan langkah-langkah dan kerja sama sebagaimana telah dijelaskan, potensi konflik identitas antara kelompok nasionalis dan agamis dapat diminimalkan, membentuk dasar bagi masyarakat yang lebih inklusif dan serasi. Keberlanjutan kerja sama dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama menjadi elemen kunci dalam manajemen dan pengurangan konflik identitas.

Kelima, Pandangan dari teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 1979) menunjukkan bahwa penggabungan kelompok yang bersifat nasionalis dan agamis dapat membentuk identitas sosial bersama, yang berpotensi mengurangi tingkat polarisasi antara kelompok-kelompok tersebut.³³ Proses bersosialisasi ini bisa memicu timbulnya rasa solidaritas di kalangan masyarakat yang membagi identitas bersama dalam hal nasional dan agama. Dengan memahami sudut pandang ilmiah ini, pilihan presiden yang menggabungkan kelompok nasionalis dan agamis dapat menjadi kesempatan krusial dalam mengurangi polarisasi di masyarakat. Mengintegrasikan konsep-konsep dari teori sosial, komunikasi persuasif, kebijakan inklusif, pendidikan multikultural, dan penguatan lembaga-lembaga demokratis dapat bekerja secara sinergis untuk membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif setelah pemilihan.

4. Penutup

Integrasi kelompok nasionalis dan agamis dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah menjadi perhatian pasca reformasi tahun 1998. Kombinasi kedua kelompok kepentingan besar tersebut menjadi desain baru kepemimpinan di Indonesia. Berkaca dari pemerintahan orde lama dan orde baru, kombinasi kepemimpinan didominasi dari tokoh nasionalis. Akan tetapi hal tersebut berubah pasca lahirnya reformasi. Sejauh penelitian ini menunjukkan terdapat tiga kelompok Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan integrasi nasionalis dan agamis. Pertama adalah Abdurrahman Wahid dan Megawati, Megawati dan Hamzah Haz, serta Joko Widodo dan Ma`ruf Amin. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara nasionalis dan agamis pasca reformasi memiliki peluang besar dalam memenangkan kontestasi pemilihan Presiden. Hal ini ditunjukkan kedua kelompok tersebut merupakan dominasi kepentingan besar

³³ Henri Tajfel dan John Turner, "An Integrative Theory of Intergroup Conflict," in *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 1979.

di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas pemilih menyalurkan aspirasi suaranya terhadap tokoh yang mewakili kepentingannya. Sehingga kombinasi nasionalis dan agamis merupakan desain yang ideal pasca reformasi di Indonesia. Penelitian ini menawarkan konteks dan metode yang berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya sehingga memberikan implikasi baru dalam keilmuan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan dan studi yang dilakukan. Keterbatasan berupa data primer dan data pendukung yang didapatkan. Sehingga celah keterbatasan tersebut diharapkan menjadi peluang penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya merupakan cita dalam mengembangkan keilmuan tentang demokrasi di Indonesia.

Referensi

- Addiansyah, M. Nur Rofiq. "Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis Dan Pragmatis." *Politea* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.6016>.
- Ahmad Burhan Hakim, and Muhyidin. "Soekarno Dan Nasakom Dalam Pendekatan Idiosinkratik (Psikologi Kepemimpinan)." *Conseils: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55352/bki.v3i1.173>.
- Arifin, Indar. "Agama Dalam Pelaksanaan Dan Kemenangan Pemilu Pilpres, Sebagai Sebuah Realitas Politik Di Indonesia." *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.29210/020221706>.
- Aswar, Hasbi, Fauzi Wahyu Zamzami, Alifya Kasih Widjayanti, and Ahmad Priyansyah. "Pertarungan Narasi Islam Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019." *Politea* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21043/politea.v5i2.17265>.
- Dahl, Robert. "The Concept of Power." *Paradigms of Political Power* 2, no. 3 (1957). <https://doi.org/10.7312/pop17594-004>.
- Fata, Mohamad Khoirul, and Pusham Surabaya. "Membaca Polarisasi Santri Dalam Kontestasi Pilpres 2019." *Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 18, no. 2 (2018). tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1511.
- Haris, Abdul, and Abdulloh Dardum. "Kiai Nu Dan Politik (Keterlibatan Kiai Nu Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019)." *Fenomena* 20, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.51>.
- Herdiansah, Ari Ganjar. "Intra-Party Conflict and the Emergence of Islamic-Based Parties in the Post-2019 Election in Indonesia." *Journal of Governance* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12700>.
- Hidayatullah, Aji Sakti, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, and Adie Dwiyanto

- Nurlukman. "Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504>.
- Hidayatulloh, Taufik, and Theguh Saumantri. "The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24235/sejati.v3i1.36>.
- Iswara, Yessy Tri, and Arwanto Harimas Ginting. "Meningkatkan Semangat Nasionalisme Melalui Pendidikan Pancasila Pada Masa Pandemi COVID-19." *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2325>.
- M.Si, Frenki. "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540>.
- Mansyur, Ibnu Chaerul. "Polarisasi Politik Di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka." *Jurnal Politik Profetik* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>.
- Mas'udah, Al Mas'udah Al. "The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia." *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss1.art3>.
- Masykuri, Romel, and Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan. "Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan Dan Polarisasi Di Antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.68-87>.
- Muhammad Saad, Dian Fitri Sabrina. "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.268>.
- Mukari, Mukari, Moch Mubarak Muharam, and Mustiqowati Ummul Fithriyyah. "Kiai Sebagai Kekuatan Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Jawa Timur." *Politea* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.12671>.
- Nashir, Haedar, Zuly Qodir, Achmad Nurmandi, Hasse Jubba, and Mega Hidayati. "Muhammadiyah's Moderation Stance in the 2019 General Election." *Al-Jami'ah* 57, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.1-24>.
- Ni'mah, Khoirotnun, Faisa Noor, Ika Putranti, and Iain Kudus. "GUS DUR'S MULTICULTURAL TRACES: WELCOMING SOCIAL HARMONY THROUGH THE RIGHTS OF RELIGIOUS MINORITIES." *SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>.

- Norris, Pippa. *Do Power-Sharing Institutions Work ? Cambridge University Press*, 1970. www.cambridge.org.
- Nurdin, Amin, Ali Thaufan Dwi Saputra, and Adi Prayitno. *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP Dan PKS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Pane, Ramadhan Siddik, and Sawaluddin Siregar. "QIYAS SEBAGAI KONSTITUSI KEEMPAT DALAM ISLAM: IMPLEMENTASI QIYAS DALAM KONTEKS SIYASAH." *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2002).
- Puspita Ratri, Elisa, and Fatma Ulfatun Najicha. "Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7455>.
- Putra, D A, and A Rulloh. "Model Kepemimpinan Strategis Dalam Menghadapi Radikalisme Dan Terorisme." *MARAS: Jurnal Penelitian ...*, no. 2022 (2023). <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/90>.
- Salahudin, Achmad Nurmandi, Hasse Jubba, Zuly Qodir, Jainuri, and Paryanto. "Islamic Political Polarisation on Social Media During the 2019 Presidential Election in Indonesia." *Asian Affairs* 51, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1812929>.
- Simbolon, Nanci Yosepin. "Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>.
- Soekarnoputri, Diah Permata Megawati Setiawati. "Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 11, no. 1 (2021).
- Suwarno, Peter. "Conservative Islamic Factions vs. Secular Nationalists: Toward a Civil Contestation in Democratic Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences* 13, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20473/ijss.v13i2.30425>.
- Tajfel, Henri, and John Turner. "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." In *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 1979.
- Yayang Nuraini Zulfani. "Palangka Law Review." *Palangka Law Review* 02, no. 02 (2022).
- Zainudin, Roni Efendi, and Jamal Mirdad. "Of Religion in the 2019 Indonesian Presidential Election" 22, no. 1 (2019).